

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia VI, 2024).

Teori yang relevan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Perlindungan Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2019, perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dalam UU RI No. 14 Tahun 2019 dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau pemberian akses bantuan hukum.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti luas, perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketidakmerataan (inequality). Jadi, program perlindungan sosial dapat mencegah individu-individu tergelincir dalam kemiskinan dan memberikan kesempatan kesempatan ketika terjadi perubahan di komunitas dan masyarakat melalui investasi modal manusia dan kesehatan. Hal ini mencakup asuransi sosial (social insurance), bantuan sosial (social assistance), pelayanan sosial (social services), dan kebijakan pasar kerja (labour market policies) (ESCAP, United Nations, 7 dalam Abu Huraerah 2022).

Perlindungan sosial adalah skema yang dirancang secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya dari berbagai risiko dalam kehidupannya, baik risiko yang timbul dari dirinya maupun yang timbul dari lingkungannya (Suharto, 2014:153). Suharto (2014:153) juga menjelaskan

bahwa secara konseptual, perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi sosial, kebijakan pasar kerja (labour market policies), serta mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat.

### 2.1.2 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (welfare) merupakan komponen fundamental dari negara kesejahteraan kontemporer. Dalam cara yang sangat konkrit, bantuan sosial adalah "jaring pengaman terakhir", yaitu program dukungan pendapatan pilihan terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara ketika mereka telah kehabisan semua pilihan lain (Bahle, Hubl, & Pfeifer, 2011 dalam Susilowati, Suharma, Favourita, Riasih, & Nainggolan, 2023).

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial).

### 2.1.3 Kemiskinan

Kajian konseptual terkait dengan kemiskinan adalah sebagai berikut:

#### a. Definisi Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, (2023) Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar minimal untuk dapat mempertahankan hidup secara layak dari segi kebutuhan pangan dan non pangan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik diukur dengan garis kemiskinan yang dilihat dari pengeluaran individu untuk kebutuhan pangan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non pangan dilihat dari perumahan, pakaian, kesehatan, Pendidikan, dan transportasi.

Kemiskinan adalah ketika seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara lingkungan mereka kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau keluar dari kerentanan menurut Cahyat dalam (Sa'diyah El Adawiyah, 2020).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Batas pemenuhan kebutuhan dasar ini diukur dengan menggunakan besaran rupiah tertentu dan dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Bappenas 2021).

Menurut Adisasmita (dalam Sa'diyah El Adawiyah, 2020) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu: (1) kurangnya peluang memperoleh pendidikan, (2) memiliki jumlah lahan dan modal pertanian yang terbatas, (3) tidak ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi di sektor pertanian, (4) tidak memenuhi salah satu kebutuhan dasar (makanan, papan,

tempat tinggal), (5) menggunakan metode pertanian konvensional, (6) kurangnya kinerja bisnis, (7) tidak mempunyai tabungan, (8) kurangnya jaminan kesehatan, (9) tidak mempunyai jaminan sosial dan asuransi, (10) korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak adanya akses untuk memperoleh air bersih, dan yang terakhir (12) tidak terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan harta tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya belum mencukupi kebutuhannya bahkan masih banyak kekurangan. Kurniawati dkk. (dalam Glory Mei Sanada Silalahi dkk., 2024).

Terdapatnya banyak definisi kemiskinan yang dilihat dari berbagai sudut pandang, masalah dalam memaknai kemiskinan menjadi semakin kompleks atau multidimensi.

#### b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab kemiskinan terdiri dari enam komponen yaitu kualitas sumber daya manusia, pekerjaan alternatif, kepemilikan modal, teknologi yang digunakan, peran lembaga ekonomi, dan kebiasaan nelayan (Glory Mei Sanada Silalahi dkk, 2024)

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah aspek infrastruktur atau prasarana dan aspek sosial. Faktor ketersediaan dan kurangnya akses terhadap prasarana yang ada dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan di suatu wilayah. Sedangkan aspek sosial berperan sebagai modal awal untuk dapat menyelesaikan permasalahan bersama dan melakukan pembangunan wilayah yang

didalamnya terdapat pembagian sumberdaya berupa tenaga, informasi dan waktu sehingga peluang terjadinya kemiskinan lebih rendah.

#### c. Indikator Kemiskinan

Menurut Adisasmita (dalam Sa'diyah El Adawiyah, 2020) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu: Kurang kesempatan memperoleh pendidikan, memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan, menggunakan cara-cara pertanian tradisional, kurangnya produktivitas usaha, tidak adanya tabungan, kesehatan yang kurang terjamin, tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, dan yang terakhir tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

#### 2.1.4 Kemandirian

Kajian konseptual terkait dengan kemandirian adalah sebagai berikut:

##### a. Definisi Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata "independen" yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri Chaplin (dalam Muhammad Aminuddin, 2020).

Definisi kemandirian menurut Desmita (dalam Azis 2018) Kemandirian adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keinginan untuk maju dan bersaing demi dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan berinisiatif untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

b. Aspek – Aspek Kemandirian

Aspek aspek Kemandirian Menurut Masrun (dalam Widayatie, 2009:19) kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk di antaranya yaitu:

- a) Tanggung jawab, yaitu kemampuan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak.
- b) Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- c) Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif.
- d) Kontrol diri, ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.

Aspek – aspek kemandirian menurut Havirghurst (dalam A. Rahmat, 2024) adalah sebagai berikut:

a) Emosi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak bergantung kepada orang. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat

mengambil Keputusan sendiri, mampu mengontrol emosi, dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung kepada orang lain.

Aspek kemandirian emosi dalam pelaksanaan program keluarga harapan dapat dilihat dalam beberapa hal dimana penerima manfaat Program Keluarga Harapan secara mandiri dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial langsung kepada pihak yang menyelenggarakan tanpa bantuan teman atau kerabat lainnya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan program keluarga harapan yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Kemandirian emosi ini juga bisa terlihat dari cara penerima manfaat bersikap dan mengontrol emosi atau perasaannya ketika tidak menerima lagi bantuan PKH.

#### b) Ekonomi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menggunakan, mengatur keuangan dengan baik, tidak bergantung kepada orang lain, dan memiliki penghasilan sendiri.

Kemandirian ekonomi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu meningkatnya taraf hidup penerima manfaat, berkurangnya beban pengeluaran, meningkatnya pendapatan keluarga, serta tidak bergantungnya penerima manfaat pada orang lain maupun pada Program Keluarga Harapan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

### c) Intelektual

Aspek dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah. Kemandirian intelektual kaitannya dengan Program Keluarga Harapan ini dapat dilihat dalam terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, kemudian pemahaman penerima manfaat terhadap produk dan jasa keuangan formal yang ada, serta pelaksanaan kewajiban penerima manfaat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Selain itu, kemandirian intelektual penerima manfaat juga dapat dilihat dari sikap dan cara dalam mengatasi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan maupun dalam masalah-masalah lainnya.

### d) Sosial

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi kepada orang lain dan tidak bergantung pada orang lain. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi dengan orang lain, berteman, membantu orang lain yang kesulitan atas kemauanya sendiri tanpa menunggu perintah dari orang lain. Kemandirian sosial penerima manfaat Program Keluarga Harapan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti adanya inisiatif penerima manfaat untuk berkomunikasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan diluar waktu penerimaan atau pemberian bantuan, eratnya relasi sosial penerima manfaat dengan keluarga, kerabat maupun orang-orang di lingkungannya, serta instensitas

penerima manfaat mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban sebagai penerima Program Keluarga Harapan.

#### 2.1.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

Tinjauan konsep terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

##### a. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (selanjutnya disingkat PKH), Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi syarat sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak Tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I (Bantuan Sosial Berbasis Keluarga) strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan yang bersifat tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

##### b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tujuan Program Keluarga Harapan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Menurunkan biaya hidup dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Memotivasi keluarga penerima manfaat untuk berubah dan menjadi lebih mandiri dalam hal mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- 4) Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial; dan
- 5) Menginformasikan keluarga penerima manfaat tentang manfaat produk dan jasa keuangan resmi

c. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen Kesehatan
    - a) Pada Ibu hamil tidak lebih dari dua kali kehamilan.
    - b) Anak dengan umur 0 sampai dengan 6 tahun : Maksimal dua anak.
  - 2) Komponen Pendidikan
    - a) Anak Sekolah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau sederajat
    - b) Anak Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau sederajat
    - c) Anak Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau sederajat
- d. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diolah berdasarkan Panduan Umum. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi PKH, Pendamping memfasilitasi sosialisasi di desa yang menerima bantuan PKH. Dalam proses ini, pendamping mengadakan pertemuan awal dengan perangkat desa lokal dan calon peserta PKH untuk mempelajari tentang tujuan dan ketentuan PKH. Mereka juga melakukan validasi data untuk menghasilkan Daftar Tetap Peserta PKH, yang kemudian dikirim ke UPPKH Pusat.
- b) Prioritas PKH didasarkan pada tingkat kemiskinan rumah tangga dan anggota keluarga atau tanggungan mereka saat mendaftar sebagai penerima PKH.
- c) Peserta Program Keluarga Harapan akan diberikan Kartu Program Keluarga Harapan jika data mereka valid dan memenuhi persyaratan. Bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan melalui empat tahap, yang dilakukan setiap tahun. Bantuan diberikan berdasarkan komponen kepersertaan peserta Program Keluarga Harapan.
- d) Prinsipnya, verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan terdiri dari pendaftaran dan kehadiran anak-anak di sekolah untuk komponen pendidikan dan di Puskesmas atau Posyandu untuk komponen kesehatan. Jika ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan ini, mereka akan diberi sanksi.
- e) Pemutakhiran data adalah perubahan pada data awal yang tercatat pada Master Database, baik sebagian maupun semuanya. Data dimutakhirkan oleh pendamping setiap kali ada perubahan. Ini dilakukan untuk komponen yang dimiliki masing-masing peserta Program Keluarga Harapan. Operator

kemudian mengirimkan data peserta Program Keluarga Harapan yang telah diverifikasi ke UPPKH Pusat untuk diupdate. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah dana Program Keluarga Harapan pada tahap selanjutnya.

e. Graduasi Program Keluarga Harapan

Petunjuk Teknis Graduasi KPM Program Keluarga Harapan (2020) menjelaskan bahwa graduasi merupakan tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Singkatnya graduasi dapat diartikan sebagai keluarnya KPM Program Keluarga Harapan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Berikut ini adalah tujuan yang dicapai oleh mereka yang graduasi dari Program Keluarga Harapan:

- 1) Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan
- 2) Memastikan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tepat sasaran
- 3) Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial
- 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial

Jenis – jenis graduasi adalah sebagai berikut:

- 1) Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM Program Keluarga Harapan sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan
- 2) Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM Program Keluarga Harapan karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan

dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainnya.

#### 2.1.6 Pekerja Sosial

Kajian konseptual terkait dengan pekerja sosial adalah sebagai berikut:

##### **a. Definisi Pekerja Sosial**

Menurut penjelasan yang disajikan oleh Andi Muhammad Arif Haris (2019), pekerja sosial merupakan suatu profesi yang terlibat dalam usaha bantuan kemanusiaan. Profesi ini memiliki fokus utama dalam memberikan dukungan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan dan peningkatan kondisi secara keseluruhan. Dengan fokus pada pertolongan sosial, pekerja sosial bertujuan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang memungkinkan penerima bantuan untuk menjalankan berbagai tugas kehidupan dengan lebih baik.

Dalam lingkup pekerjaan, pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu individu dan kelompok yang mungkin menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupan. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk masalah sosial, emosional, ekonomi, dan psikologis. Pekerja sosial bekerja untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh klien, sehingga dapat mencapai potensi maksimal dan menjalankan peran dalam masyarakat dengan lebih baik.

Sementara itu, definisi pekerjaan sosial yang ditemukan dalam penelitian kurikulum yang didukung oleh *the Council on Social Work Education* pada Tahun 1959, sebagaimana dipaparkan dalam Fahrudin (2012: 59), dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatankegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatankegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pecegahan disfungsi sosial.”

Secara komprehensif, Pekerjaan Sosial bertujuan untuk memperbaiki keberfungsian sosial individu, baik secara individual maupun dalam konteks kelompok, melalui serangkaian kegiatan yang berfokus pada hubungan sosial dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah mengembangkan interaksi yang sehat antara individu dan lingkungannya, dengan tiga fungsi kunci yang dapat diidentifikasi. Pertama, fungsi pemulihan kemampuan yang terganggu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan kemampuan individu yang mungkin terpengaruh oleh berbagai faktor. Kedua, fungsi penyediaan sumber-sumber individu dan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar individu atau kelompok dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ketiga, fungsi pecegahan disfungsi sosial berupaya mencegah terjadinya masalah sosial dengan membangun ketahanan dan pemahaman terhadap dinamika sosial.

## **b. Peran Pekerja Sosial**

Pekerjaan sosial memegang peran yang signifikan sebagai pemberi bantuan dalam mendukung individu, keluarga, serta masyarakat untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan sosial, dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih optimal. Kehadiran pekerjaan sosial bukan hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga melibatkan pelaksanaan berbagai peran yang mencakup tugas-tugas khusus. Menurut Sukoco (2019), peranan pekerjaan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peran yang pertama adalah sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengatasi masalah dan mengembangkan kapasitas dalam menghadapi perubahan. Melalui dukungan dan bimbingan, pekerja sosial membantu mengakses sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Peran yang kedua adalah sebagai perantara (*Broker*). Dalam peran tersebut, pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara individu, kelompok, dan masyarakat dengan lembaga atau layanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan. Pekerja sosial membantu dalam menghubungkan Masyarakat miskin dengan berbagai layanan dan dukungan yang tersedia di Masyarakat.

Peran yang ketiga adalah sebagai Pendidik (*Educator*). Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara terang dan mudah dimengerti bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Pekerja Sosial bertugas menyampaikan pengetahuan tentang isu-isu

sosial, hak-hak, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah serta meningkatkan kualitas hidup.

Peran yang keempat yaitu sebagai Tenaga ahli (*Expert*). Sebagai seorang spesialis, pekerja sosial mampu memberikan kontribusi, rekomendasi, serta dukungan kepada individu, kelompok, dan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan keahlian dalam berbagai aspek masalah sosial. Pekerja Sosial membantu individu dan kelompok dalam merencanakan tindakan yang efektif.

Peran yang kelima yaitu sebagai Perencana sosial (*Social planner*). Seorang perencana sosial menghimpun informasi terkait permasalahan sosial yang dihadapi oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Pekerja Sosial melakukan analisis mendalam terhadap situasi tersebut dan menyajikan berbagai opsi tindakan yang berdasarkan akal sehat untuk mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan yang ada.

Peran yang keenam yaitu sebagai fasilitator, pekerja sosial merangsang dan mendukung perkembangan masyarakat. Pekerja Sosial memfasilitasi proses perubahan dengan memberikan bimbingan, memberikan waktu, ruang, dan alat yang diperlukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai tujuan.

Keseluruhan peran ini menggambarkan bagaimana pekerja sosial berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial positif, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memfasilitasi pemberdayaan individu dan kelompok. Melalui peran-peran ini, pekerja sosial berusaha untuk membantu individu dan masyarakat

agar dapat hidup lebih baik, mandiri, dan memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat.

### c. Tujuan Pekerja Sosial

Sasaran utama yang perlu dicapai oleh seorang pekerja sosial adalah mengembalikan serta meningkatkan kemampuan sosial individu, kelompok, dan komunitas dengan tujuan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Tujuan praktik pekerjaan sosial yang dijabarkan oleh NASW (*National Association of Social Workers*), sebagaimana dijelaskan dalam karya Fahrudin (2019), meliputi:

Salah satu peran utama dalam bidang pekerjaan sosial yaitu menolong individu mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan memberikan dukungan emosional, keterampilan penyelesaian masalah, dan strategi *coping* yang efektif. Pekerja sosial membantu individu tumbuh dan berkembang dalam menghadapi perubahan dan rintangan.

Pekerjaan sosial berfungsi sebagai penghubung antara individu, kelompok, atau masyarakat dengan berbagai sistem pemberian layanan dan sumber daya. Pekerja sosial membantu memastikan bahwa klien memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya.

Pekerja sosial juga terlibat dalam meningkatkan efektivitas sistem-sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ini melibatkan memastikan bahwa sistem-sistem tersebut berfungsi secara manusiawi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan layanan dengan cara yang efisien dan efektif.

Pekerjaan sosial turut melibatkan peran dalam meningkatkan dan merestorasi kebijakan sosial. Para pekerja sosial berkontribusi dalam merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan program-program yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan tantangan sosial lainnya.

Keseluruhan, pekerjaan sosial memiliki peran yang beragam dan luas, dari membantu individu secara pribadi hingga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen pekerja sosial demi meningkatkan mutu kehidupan serta kesejahteraan individu dan masyarakat yang pekerja sosial layani.

#### **d. Relevansi dengan Bidang Kemiskinan**

Dalam menghadapi kompleksitas isu kemiskinan, peran pekerjaan sosial memiliki dampak yang luar biasa dalam membawa perubahan positif bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang terdampak. Pekerja Sosial tidak hanya menjadi agen pemberi bantuan semata, tetapi juga menjadi katalisator dalam mengubah paradigma dan pandangan terhadap orang miskin. Pada upaya mengatasi kemiskinan, pekerjaan sosial membawa dua pilar yang esensial: mengubah perspektif dan menjadi pendamping dalam program-program penanggulangan yang didirikan oleh pemerintah.

Tidak hanya berhenti pada perubahan pandangan, pekerjaan sosial juga turut berperan langsung dalam inisiatif yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan. Sebagai pendamping tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga membantu dalam

merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui dukungan moral, pembinaan keterampilan, dan akses ke sumber daya, pekerjaan sosial membantu individu miskin untuk meraih kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup.

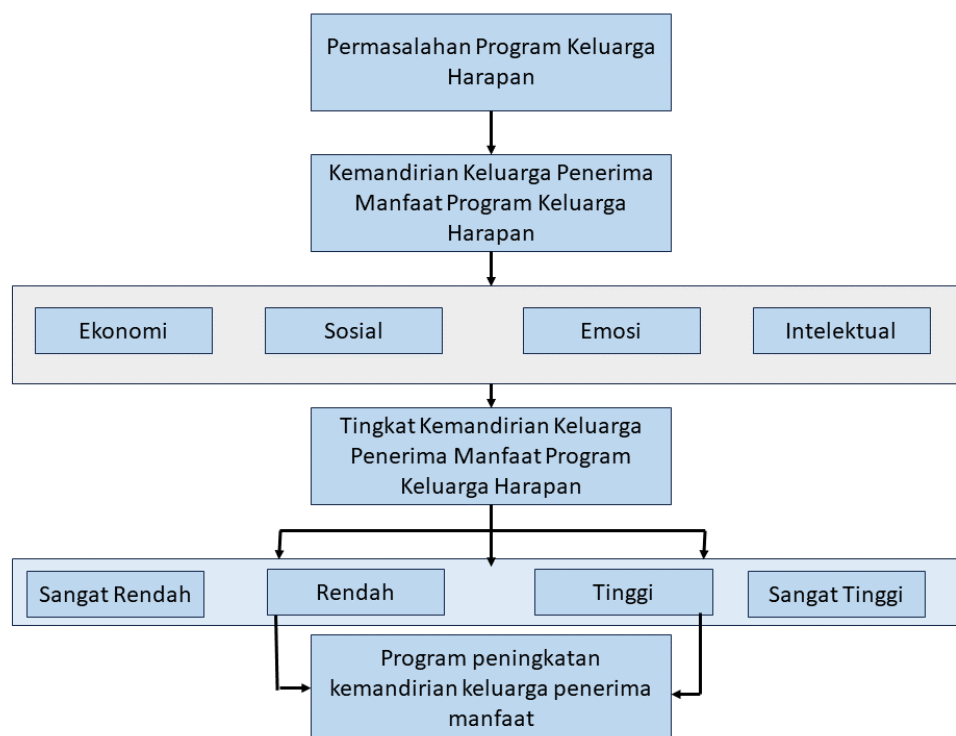
Dalam konteks ini, pekerjaan sosial mengakui bahwa kondisi individu miskin tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus melibatkan perbaikan pada lingkungan tersebut. Perubahan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif dapat memberikan dampak positif pada individu miskin, memungkinkan untuk mengakses lebih banyak sumber daya, peluang, dan dukungan sosial

Intervensi pada lingkungan juga berperan dalam meningkatkan keberfungsian individu. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu miskin, misalnya dengan menyediakan akses ke layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau layanan kesehatan yang terjangkau, dapat membantu individu untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi kemiskinan.

Dengan demikian, peran pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup individu dan lingkungan di sekitarnya. Intervensi yang komprehensif pada kedua aspek ini dapat membantu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak positif dalam upaya mengatasi tantangan kemiskinan. Pekerjaan sosial tidak hanya mengarah pada pemulihan individu, tetapi juga pada perbaikan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian yang berjudul Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Pasca Graduasi di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:



Bagan 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemikiran diatas dijelaskan bahwa pada permasalahan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Akibat dari Masyarakat yang bergantung pada program keluarga harapan karena Masyarakat belum tepat pada pemanfaatan bantuan sosial tersebut. Masyarakat terbiasa untuk menggunakan dana bantuan sosial untuk kebutuhan lain.

Kondisi ideal Keluarga Penerima Manfaat yang telah graduasi adalah kondisi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan karena kondisi sosial ekonomi yang sudah

meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Fakta dilapangan bahwa Masyarakat masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan disaat keluarga penerima manfaat dihentikan untuk mendapatkan bantuan.

Peneliti tertarik untuk mengukur kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Pasca Graduasi tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan aspek kemandirian Havighurst (dalam DS, 2009) bahwa aspek dari kemandirian terdapat aspek kemampuan ekonomi, sosial, emosi, dan intelektual.

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti merancang usulan program untuk meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, bagaimana keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dapat berdaya mandiri pada saat komponen tersebut sudah tidak terpenuhi dan tidak mendapatkan bantuan.